Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Melalui Media Sosial

Dhea Ayu Regita, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : yeniwidowaty@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.19281>

Abstrak

Perkembangan media sosial dapat memudahkan pelaku perundungan berinteraksi di media sosial yang dapat merugikan orang lain, sehingga perlu dibutuhkannya payung hukum dalam melindungi korban tindak pidana perundungan di media. Perlindungan Hukum memberikan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi korban. Akan tetapi masih belum ada ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban perundungan melalui media sosial. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perundungan melalui media sosial dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan melalui media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dalam bentuk yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 2 faktor penting penyebab terjadinya perundungan di media sosial yaitu faktor eksternal dan Internal. Selanjutnya perlindungan hukum korban perundungan di media sosial telah diatur dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana korban berhak mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikologis serta memperoleh restitusi maupun kompensasi. Adapun perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham yang bersifat preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan agar dapat menjamin penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum

Kata Kunci: Perundungan, Cyberbullying, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

Abstract

The development of social media can make it easier for bullies to interact on social media which can harm others, so a legal umbrella is needed to protect victims of bullying in the media. Legal Protection provides rights and assistance to create a sense of security for victims. However, there are still no clear provisions regarding legal protection for victims of bullying through social media. So this study needs to be conducted in order to find out what factors cause bullying through social media and how legal protection is provided for victims of bullying through social media. This study was conducted using a normative research method using legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which were analyzed in a systematic form. The results of the study showed that 2 important factors were found causing bullying on social media, namely external and internal factors. Furthermore, legal protection for victims of bullying on social media has been regulated in Article 27 of the ITE Law and Article 7A of the Witness and Victim Protection Law where victims have the right to receive physical and psychological protection and receive restitution or compensation. The legal protection carried out by the Ministry of Law and Human Rights is preventive in nature in the form of legal counseling and guidance to ensure the provision of legal aid in accordance with legal aid service standards.

Keywords: Bullying; Cyberbullying; Legal Protection, Criminal Acts

I. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sosial di Indonesia. Dari mulai memudahkan komunikasi jarak jauh antar individu maupun organisasi hingga memudahkan akses informasi dan mempercepat proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kehadiran teknologi 2 tersebut telah membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam memfasilitasi berbagai kegiatan seperti berbagi informasi, yang menjadi lebih mudah diakses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dunia maya dengan segala bentuknya seperti jejaring sosial, forum diskusi, blog, dan platform virtual lainnya, memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam berbagai aktivitas seperti berbagi, berpartisipasi, menghasilkan konten, dan lain sebagainya.¹

Adapun media online yang banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia adalah seperti Tumblr, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Dari beberapa tahun terakhir, teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Media sosial telah menjadi sarana yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat dengan mudah membagikan informasi, pengalaman, dan pemikiran dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, bahkan dengan mereka yang berada di tempat yang jauh, dalam waktu yang singkat dan tanpa biaya yang mahal.²

Dalam era digital saat ini, akses mudah ke internet memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara virtual tanpa harus bertemu langsung. Internet memberikan ruang bagi orang-orang untuk saling bertukar informasi, pandangan, dan pendapat secara real-time, meskipun jarak jauh memisahkan mereka. Kehadiran ruang virtual ini memungkinkan orang untuk merasa lebih leluasa dalam mengekspresikan diri mereka dan berbagi apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun, tidak semua dampak dari komunikasi virtual selalu positif. Ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti perundungan dalam bentuk ekspresi, komentar kasar, penghinaan, atau tindakan virtual yang dapat merugikan orang lain.³

Terlihat bahwa di Indonesia, perundungan atau tindakan *bullying* yang terjadi secara online dan melalui media sosial semakin meningkat dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan media sosial digunakan sebagai alat untuk menyerang, mengancam, melecehkan, menghina, atau mempermalukan individu. Bentuk perundungan online seperti ini telah menjadi salah satu jenis penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merusak kesehatan mental dan kesejahteraan individu yang menjadi korban. Tidak hanya itu, tindakan seperti ini dapat berdampak pada karier atau pekerjaan seseorang, atau bahkan dapat merusak reputasi dan citra mereka di masyarakat.⁴ Meskipun ini dianggap sebagai kejadian umum dan biasa dalam kehidupan sosial, tetapi hal tersebut berdampak serius bagi korban dengan gangguan psikologis yang dialaminya.⁵

Perundungan di media sosial itu sendiri juga termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Tindakannya biasanya berbentuk intimidasi yang ditujukan oleh pelaku untuk menyerang korban di media sosial melalui perangkat teknologi. Dalam kasus perundungan melalui media sosial, pelaku sering ingin membuat korban mereka dipermalukan, tertekan, dicemari atau diancam dengan melakukan berbagai cara. Sementara itu, pelaku sendiri dapat dengan mudah melakukan tindakan mereka dengan menyerang korban mereka melalui media sosial, seperti membuat ancaman, penghinaan, pesan intimidasi, pelecehan atau merendahkan martabat korban.⁶ Biasanya, korban menunjukkan gejala perilaku seperti kesepian, malu, menangis saat berbicara, tidak berani pergi keluar dan bertemu orang lain di luar rumah mereka. Gangguan mental ini sulit diidentifikasi, sehingga hasil dari apa yang dialami korban tidak meninggalkan jejak yang dapat dilihat oleh orang lain.⁷

Tindak pidana perundungan melalui media sosial juga termasuk ke dalam kejahatan terhadap individu maupun terhadap masyarakat, tetapi aturan hukum terkait tindak pidana perundungan melalui media sosial masih lemah, sehingga tidak dapat digunakan secara efektif dalam sidang pengadilan,

¹ Data Reportal. (2022). *Data Perundungan di Media Sosial*. Diakses pada Selasa, 22 Nopember 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.

² Yunus Winoto & Andi Rahmat Sopian. (2019). Remaja dan Pandangannya terhadap *Cyberbullying* pada Media facebook, *Jurnal Komunikasi dan Media*. 3(2). H. 23.

³ Nurahma Yanti. (2018). Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pustaka Ilmiah*. 4(1). H. 575-581

⁴ Adawiyah, S, R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja* (Thesis). Yogyakarta. Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan. H. 398-403.

⁵ Novita Maulidya & Miftah Idris Muliana. (2020). Faktor-faktor Cyberbullying pada Remaja. *Jurnal IKRA- ITH*. 5(2), H. 322

⁶ Mohamad, F.Z. (2022). *KPAI: Cegah cyberbullying Ajari anak Menjaga Privasi di Sosial Media*. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 18.00 WIB. <https://mediaindonesia.com/humaniora/437242/kpai-cegah-cyberbullying-ajari-anak-menjaga-privasi-di-sosial-media>.

⁷ Sartana, Afriyeni, N. (2017). Perilaku perundungan maya (cyberbullying) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight Universitas Pendidikan Indonesia*. 1(1). H. 25-41.

sementara, perilaku perundungan melalui media sosial dapat memiliki dampak merugikan dan mengkhawatirkan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kemungkinan bunuh diri pada korbannya. Aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana perundungan melalui media sosial yang lemah mengakibatkan penindakan hukum terhadap pelaku perundungan menjadi kurang efektif. Sebagai akibat dari peraturan yang kurang jelas, lembaga penegak hukum cenderung menangani kasus perundungan di media sosial sebagai tindak pidana umum yang sama dengan tindak pidana lainnya.

Sementara itu, sebelum Undang-Undang ITE diberlakukan, korban perundungan melalui media sosial tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Ini disebabkan karena tidak ada peraturan hukum yang secara spesifik melindungi korban perundungan di *platform* media siber yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi atau lebih dikenal dengan istilah *cyberspace*. Namun, setelah Undang-Undang ITE diberlakukan, korban perundungan di media sosial melalui jaringan telekomunikasi kini mulai mendapat perlindungan hukum. Namun, meskipun demikian, masih banyak terasa bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum cukup adil bagi para korban. Undang-Undang ITE menghadapi masalah utama karena tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kategori orang atau pihak yang dapat dianggap sebagai korban dari tindak pidana perundungan di media sosial. Kondisi ini akan memerlukan tindakan yang lebih tegas dan jelas untuk memastikan bahwa korban perundungan melalui media sosial yang melibatkan jaringan telekomunikasi mendapat perlindungan hukum yang memadai dan adil.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penting kiranya membahas penelitian ini guna mengetahui bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan di media sosial. Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perundungan melalui media sosial?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan melalui media sosial?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan Metode pendekatan peraturan perundang-undangan” (statue approach) dan “pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan melakukan wawancara di lokasi tempat Pengadilan Negeri Sleman. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah atau objek yang diteliti, sehingga dapat dipahami secara utuh.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perundungan di Media Sosial

Istilah perundungan adalah relatif baru dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang lebih kuat atau merasa kuat yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, dilakukan secara berulang-ulang, dan biasanya untuk melemahkan dan menghancurkan korban atau memuaskan pelaku.⁸ Pendapat lain mengartikan perundungan sebagai bentuk agresi yang bertujuan untuk menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik atau mental.

Perundungan dapat merusak kesehatan mental korban dan digolongkan sebagai kekerasan psikologis. Perundungan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menakuti dan mengancam korban secara berulang-ulang. Selain itu, perundungan terjadi karena adanya berbagai unsur dalam proses perilaku. Menurut Diena Haryana, terdapat beberapa unsur-unsur yang terlibat dalam perundungan, yaitu:⁹

- a. Pelaku perundungan adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan atas korban. Biasanya

⁸ Rigby Ken, Elinda Emza. (2015). *Fenomena Bulliyng di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta* (Skripsi). Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. H. 91.

⁹ Diena Haryana. 2020. *Bincang Sejiwa*. Diakses Pada Senin, 2 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB. <https://sejiwa.org/notulensi-sesi-perdana-bincang-sejiwa/>

pelaku memiliki sifat temperamental, kuat, dan agresif terhadap korban.

- b. Korban perundungan cenderung memiliki fisik, kondisi, atau situasi yang lemah. Korban seringkali menjadi target pelaku karena dianggap lebih mudah dikalahkan atau diintimidasi.
- c. Saksi dalam perundungan biasanya terlibat dalam dua wilayah. Pertama, saksi dapat mendukung pelaku dan terlibat langsung dalam tindakan perundungan. Kedua, saksi juga dapat bersikap diam dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu korban, meskipun mereka mengetahui adanya tindakan perundungan yang terjadi.
- d. Lingkungan di sekitar korban dan pelaku juga memiliki peran penting dalam tindakan perundungan. Lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan ikut memperparah situasi dapat memperburuk kondisi korban. Sebaliknya, lingkungan yang proaktif dalam memberikan dukungan dan menentang tindakan perundungan dapat membantu mencegah tindakan tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban.
- e. Teknologi Dalam era digital saat ini, teknologi juga menjadi unsur penting dalam tindakan perundungan. Perundungan melalui media sosial atau internet seringkali lebih berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang lebih luas. Pelaku perundungan dapat dengan mudah menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi korban secara online, yang dapat merusak reputasi dan kesehatan mental korban.

Perundungan merupakan tindakan sadar dan sengaja oleh pelakunya. Pelaku perundungan pada dasarnya memiliki berbagai alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Terdapat beberapa bentuk perundungan jika didasarkan pada berbagai pendapat para ahli. Sullivan (dalam Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk perundungan, yaitu:¹⁰

- a. Perundungan Fisik, misalnya memukul, menjambak, menggigit, mengintimidasi, memutar, mendorong, mencakar, meludah, merusak barang milik korban, menggunakan senjata untuk menyerang/melukai korban;
- b. Non-Fisik, verbal dan non-verbal: Verbal; penghinaan, pemalakan, pemerasan, pengancaman, penghasutan, perkataan kotor, berkata bernada tekanan/intimidasi, dan penyebarluasan kejelekan korban. Non-verbal, yaitu: Tidak langsung; manipulasi pertemanan, penghasutan, pengusiran; Langsung; penghinaan menggunakan isyarat tangan maupun kaki atau anggota badan lainnya, pengancaman dengan menggunakan bahasa tubuh.

Perundungan melalui media sosial adalah bentuk perilaku yang merugikan seseorang secara psikologis atau emosional dengan menggunakan media sosial. Tindakan ini melibatkan penggunaan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang merendahkan, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang. Perilaku ini dapat berupa komentar, meme, maupun pesan yang bersifat menghina, merendahkan, mengancam yang diposting di situs media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Dalam beberapa kasus, perundungan melalui media sosial dapat berkembang menjadi kekerasan fisik atau tindakan yang merugikan secara sosial. Korban perundungan melalui media sosial seringkali merasa malu, tidak berdaya, dan terisolasi karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi tindakan tersebut. Perilaku ini dapat memiliki efek yang merugikan pada kesehatan mental dan emosional korban, seperti menimbulkan stres, depresi, kecemasan, dan bahkan pengalaman traumatis. Hal ini terutama terjadi karena media sosial memungkinkan orang untuk menyebarkan pesan yang merugikan dalam skala besar dan dengan cepat, dan memberi pengguna kemampuan untuk memposting secara anonim atau dengan akun palsu. Perundungan melalui media sosial juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial di mana korban berada. Misalnya, serangan online dapat menyebar di antara kelompok teman atau pengikut korban dan menyebabkan isolasi sosial dan diskriminasi. Ini bisa menjadi sangat sulit untuk diatasi, karena media sosial memungkinkan pesan untuk terus menyebar bahkan setelah korban memutuskan untuk menghentikan akses atau melapor ke pihak berwenang. Sementara itu, penting dalam menggunakan media sosial untuk memahami dampak negatif dari Perundungan melalui media sosial dan bertanggung jawab dalam cara mereka menggunakan platform tersebut. Para pengguna juga harus mempelajari cara mengenali perundungan dan mengambil tindakan untuk mencegah atau melaporkannya ketika mereka melihatnya terjadi di media sosial.

¹⁰ Ponny Retno Astuti. (2008). *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo. H. 44.

Tidak hanya korban yang terpengaruh, tetapi Perundungan melalui media sosial juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari orang yang terlibat. Ini dapat menciptakan suasana yang tidak sehat di mana kekerasan, diskriminasi, dan perundungan diterima sebagai norma, serta membentuk budaya yang tidak ramah dan tidak aman di media sosial. Karena media sosial menjadi semakin penting dalam kehidupan modern, perundungan melalui media sosial merupakan masalah yang semakin berkembang dan perlu ditangani dengan serius. Hal ini menuntut kesadaran dan tindakan dari semua pihak, termasuk pengguna media sosial, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat secara umum, untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menghargai hak asasi manusia serta kesejahteraan mental semua orang.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa perundungan awalnya hanya terjadi secara fisik, tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, tindakan perundungan semakin meluas dan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara verbal dan/atau mental-psikologis ketika tindakan tersebut dilakukan di dunia maya atau *cyberspace*. Sementara itu, perundungan di dunia maya menjadi semakin marak terjadi, terutama di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube dan platform media sosial sejenisnya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, kemungkinan terjadinya *cyberbullying* juga meningkat. Bentuk-bentuk perundungan di dunia maya sangat beragam, mulai dari ancaman, penghinaan, penyebaran desas-desus atau berita yang tidak benar, hingga tindakan asusila. Pelaku juga dapat mencuri atau meretas kata sandi akun korban untuk memperbarui postingan dengan kata-kata atau gambar yang tidak pantas. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran dan tindakan yang proaktif dalam mengatasi masalah *cyberbullying* di Indonesia.

Dalam konteks jejaring sosial atau media sosial, tindak perundungan memiliki potensi untuk lebih mudah dilakukan karena pelaku dan korban tidak berhadapan secara langsung. Namun, kelemahan utama perundungan di media sosial adalah bahwa sulit untuk mendeteksi pelaku karena banyak akun sosial palsu atau disembunyikan. Hal ini menjadikan perundungan di media sosial sebagai masalah yang sulit dikendalikan karena sulit untuk mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. Sebagai konsekuensinya, perundungan di media sosial memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan perundungan tradisional karena sangat mudah dilakukan dan mencakup jumlah orang yang lebih banyak. Banyak kasus perundungan di media sosial telah membuat korban menjadi depresi dan cemas, bahkan dalam beberapa kasus, menyebabkan bunuh diri. sementara itu, perlu ada tindakan untuk mencegah perundungan di media sosial dan melindungi korban dari dampak negatifnya.¹¹

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perundungan di Media Sosial

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan internet yang semakin meluas. Jaringan internet kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan khususnya generasi muda Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, pemerintah Indonesia pun berupaya untuk memanfaatkan potensi internet sebagai alat untuk memajukan berbagai aspek kehidupan di Indonesia

Meskipun media sosial memberikan manfaat besar dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, media sosial juga memiliki sifat merusak. Penggunaan internet yang semakin luas telah memberikan celah bagi jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang menggunakan media elektronik atau internet dan terus berkembang dalam bentuk dan ragam kejahatannya.¹²

Sementara, perundungan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital saat ini. Seperti halnya perundungan yang dilakukan secara fisik atau tradisional, perundungan di media sosial juga melibatkan tindakan yang merugikan dan merendahkan korban, namun perbedaannya terletak pada cara pelakunya melakukan tindakan tersebut, yaitu melalui media sosial atau platform digital menggunakan teknologi internet.

Dalam perundungan di media sosial, korban seringkali diperlakukan dengan kasar dan tidak sopan oleh pelaku, seperti dengan menyebarkan foto atau video memalukan, mengirimkan pesan yang

¹¹ Lianthy Nathania Paat. (2020). Kajian Hukum terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*. 1(9). H. 13.

¹² Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. H. 47-48.

mengandung ancaman atau pelecehan, atau menyebarkan informasi pribadi korban secara tidak sah. Pelaku perundungan di media sosial dapat mengakses korban dengan mudah karena korban mungkin terhubung dengan media sosial atau internet secara terbuka.

Perundungan di media sosial dapat sangat merusak psikologis dan emosional korban. Perundungan di media sosial menjadi semakin relevan dalam konteks global saat ini karena semakin banyak orang yang terhubung dengan internet dan media sosial, oleh karena itu, perlindungan terhadap korban perundungan di media sosial menjadi semakin penting dan mendesak. Dibutuhkan tindakan yang efektif dan proaktif dalam mengatasi perundungan di media sosial agar masyarakat dapat terlindungi dan merasa aman dalam menggunakan teknologi internet dan media sosial.

Sebuah laporan Data Reportal pada Januari 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 191 juta orang, yang terus meningkat sekitar 21 juta pengguna dari tahun sebelumnya, sedangkan media sosial yang sangat populer di Indonesia adalah YouTube.com dengan jumlah pengguna mencapai 139 juta, di Indonesia, Facebook memiliki jumlah pengguna di Indonesia sebanyak 129,9 juta pengguna pada Januari 2022, selain Facebook dan Youtube, Instagram juga memiliki pengguna yang cukup banyak yaitu sebanyak 99,15 juta, Tidak kalah dari Instagram Tiktok juga memiliki pengguna sebanyak 92,7 juta dan yang terakhir twitter memiliki peminat yang rendah yaitu sekitar 18,7 juta di Indonesia.¹³

Berdasarkan beberapa data-data dari berbagai sumber di atas terlihat jelas bahwa bentuk perundungan telah berkembang dari tindakan fisik menjadi tindakan verbal dan mental-psikologis, terutama ketika dilakukan di media sosial. Hal inilah yang menyebabkan perundungan di dikenal sebagai *cyberbullying*. Sebagian besar kasus *cyberbullying* terjadi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Tiktok, dan YouTube.

Meningkatnya jumlah kasus perundungan di media sosial melalui media sosial menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi, oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan tersebut. Dalam hal ini penulis telah mengkatagorikan penyebab terjadinya perundungan melalui media sosial menjadi 2 (dua) macam yaitu faktor Internal dan Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Eksternal

a. Perkembangan teknologi yang pesat

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada cara hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam era ini, jaringan online, termasuk media sosial, game online, situs web pribadi, ruang obrolan, email, dan pesan teks atau gambar digital, telah menjadi sarana bagi banyak orang untuk berkomunikasi di dunia maya, namun, ketika banyak orang berinteraksi di dunia maya, maka konflik dan masalah muncul sebagai akibat langsung dari perkembangan teknologi tersebut. Perundungan melalui jejaring sosial merupakan salah satu masalah yang seringkali muncul dalam lingkungan sosial di dunia maya. Fenomena ini terjadi ketika pengguna media sosial melakukan tindakan perundungan terhadap pengguna lainnya melalui media sosial atau jejaring sosial lainnya.

Meskipun masih banyak orang yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, pola penggunaannya telah mengalami perubahan yang signifikan. Banyak orang yang dulunya melakukan kegiatan sosial di luar rumah, seperti bertemu teman-teman, bermain di taman, atau berolahraga, kini beralih ke interaksi di dunia maya, seperti media sosial dan game online. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, seseorang dapat melakukan aktivitas apa saja di dunia maya, bahkan melakukan perundungan melalui jejaring sosial, oleh karena itu, penting untuk mengenali perubahan perilaku yang terjadi pada pengguna media sosial dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi lingkungan sosial di dunia maya. Semakin tinggi intensitas penggunaan internet, semakin rentan seseorang terhadap perundungan melalui media sosial. Interaksi yang semakin banyak di dunia maya, memperbesar kemungkinan terjadinya perundungan di media sosial.

Menurut Josua dalam penelitiannya, kemajuan teknologi yang berkembang secara pesat merubah pola hidup dalam masyarakat baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

¹³ Data Reportal. (2022). *Data Perundungan di Media Sosial*. Diakses pada Selasa, 22 Nopember 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.

Kejahatan yang pada awalnya dilakukan dengan cara-cara konvensional sudah mengalami perkembangan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut seperti kejahatan penipuan, pencernaman nama baik, perundungan, dan pemerasan maupun pengancaman dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi.¹⁴

Menurut Fatma Utami dan Nur Baiti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dengan perkembangan teknologi yang pesat dapat memudahkan pengguna untuk melakukan perundungan melalui media sosial, pelaku dapat memposting tulisan kejam atau mengunggah foto yang berhubungan dengan individu lain dengan tujuan mengintimidasi dan merusak nama baik korban sehingga korban merasa tersakiti dan malu, sedangkan pelaku merasa puas dan senang karena tujuannya telah tercapai.¹⁵

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih seseorang dapat melakukan aktivitas apa saja di dunia maya, bahkan melakukan perundungan melalui jejaring sosial. Semakin tinggi intensitas pengguna internet, semakin rentan seseorang terhadap perundungan melalui media sosial, interaksi semakin banyak di dunia maya dapat memperbanyak ataupun memperbesar kemungkinan terjadinya perundungan di media sosial tersebut.

b. Kontrol sosial yang melemah

Fakta bahwa perundungan melalui media sosial dapat dilakukan oleh siapa saja. Meski cenderung memiliki karakteristik tertentu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perundungan di media sosial bersumber dari menurunnya atau bahkan hilangnya kontrol sosial. Menurut Febrizal Antama, yang merujuk pada kemampuan kelompok atau lembaga sosial dalam masyarakat untuk menegakkan norma atau peraturan yang efektif. Perundungan melalui media sosial bisa terjadi karena lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga, teman, dan masyarakat¹⁶.

Ketika seseorang memiliki waktu luang untuk membuka media sosial, maka dia bisa mudah terbawa tren. Seperti misalnya ketika ada satu orang yang sedang dirundung di media sosial, akhirnya yang lain juga ikut-ikutan merundungnya, padahal belum tentu yang bersangkutan tahu persoalan mengapa orang tersebut dirundung. Dalam era modernisasi, nilai dan etika dalam berbicara dan bertindak perlahan-lahan menghilang. Seiring waktu, institusi kontrol sosial tidak lagi dapat membimbing orang dalam interaksi etis dengan orang lain. Selain itu, banyak kasus perundungan melalui media sosial terjadi karena lemahnya peran norma agama dan norma sosial, karena perundungan di media sosial seperti sudah menjadi hal biasa, dan seolah-olah sudah diterima oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat menyulitkan masyarakat untuk membimbing individu yang bersangkutan.

2) Faktor Internal

a. Ketidaktahuan akan resiko Hukum

Dalam faktor ini sebenarnya banyak terdapat kemungkina yang menyebabkan pelaku perundungan di media sosial tidak menyadari risiko hukum yang terlibat dalam tindakan mereka baik itu dengan ketidaktahuan atau ketidaktahuan yang disengaja tentang Undang-Undang ITE, yang tergolong masih belum sepenuhnya dipahami secara luas oleh masyarakat.

Pada putusan No 175/Pid.Sus/2020/Pn Smn disini terdakwa atas nama Hero Yuwono Bin Suyatno memberikan keterangan jika perundungan yang dilakukan olehnya hanya dikarnakan mencari hiburan di waktu luang. Kebanyakan orang yang suka melakukan perundungan di media sosial memang sering terjadi dikarenakan Banyak orang yang tidak mengetahui tentang etika dan hukum yang berlaku dalam penggunaan media sosial, sehingga seseorang tidak menyadari dampak tindakan mereka dan memicu tindak pidana perundungan melalui media sosial. Dalam putusan tersebut terdakwa atas nama Hero Yuwono Bin Suyatno sebelumnya telah mendapatkan sanksi pidana pada tahun 2015 dan 2016 dengan kasus penipuan serta pada tahun 2018 dengan kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Terdakwa

¹⁴ Nababa, Josua. (2022). Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dengan Cara Pengancaman Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum UHN*. 2(1). H. 57.

¹⁵ Fatma Utami & Nur Baiti. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Cakrawala*. 18(2). H. 257.

¹⁶ Febrizal Antama. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta Indonesia. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 2(2). H. 66 - 77.

sebenarnya telah menyadari akan resiko hukum akibat dari perbuatannya, namun terdakwa dengan sengaja membuat seolah-olah tidak mengetahui resiko hukuman padahal sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa disini merupakan tindak pidana yang dapat merugikan korban secara finansial maupun psikologis.

Pada kasus kedua yang mana pada putusan Nomor 843/Pid.sus/2018/Pn.jmr Terdakwa melakukan perundungan di media sosial terhadap korban dikarenakan hanya ingin mendapatkan kepuasan diri. Dalam kronologi kasusnya pada awalnya korban memposting fotonya di laman facebook, kemudian terdakwa selaku mantan pacar korban memberikan komentar yang berkonotasi negatif, sehingga korban merasa tidak terima dan melaporkan kasus tersebut di kepolisian jember. Adanya perundungan di media sosial dapat dipicu oleh motivasi yang beragam. Seseorang dapat melakukan perundungan di media sosial karena merasa marah dan sakit hati terhadap orang lain, dan ingin melakukan balas dendam. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman buruk yang pernah dialami oleh pelaku, dan merasa bahwa orang lain harus merasakan apa yang telah mereka alami sehingga tidak bisa diabaikan bahwa disini terdakwa hanya terbawa emosi sesaat dan tidak memahami konsekuensi hukum akan Tindakan yang dilakukan olehnya.

Menurut wawancara dengan Ibu Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perundungan di media sosial adalah kurangnya pemahaman akan risiko hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Kebanyakan pelaku perundungan di media sosial tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran hukum dan dapat diproses secara pidana. Banyak dari mereka yang percaya bahwa perilaku perundungan di media sosial adalah sekadar ungkapan diri atau bahkan bercanda belaka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka ucapkan atau tindakan yang mereka lakukan di media sosial dapat berdampak serius pada korbannya, dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi diri mereka sendiri, oleh karena itu, penting bagi semua pengguna media sosial untuk memahami risiko hukum yang terkait dengan perilaku di dunia maya, dan untuk bertindak dengan kesadaran penuh akan dampak yang mungkin terjadi.¹⁷

Sebenarnya pelaku perundungan melalui media sosial khususnya anak di bawah umur tidak menyadari resiko hukum yang terlibat dalam tindakan mereka, sehingga seringkali menganggap bahwa tindakan mereka hanya sebagai bentuk ekspresi diri atau lelucon yang tidak berbahaya. Hal ini berbeda dengan perundungan di media sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana pelaku perundungan tersebut menggunakan akun dengan identitas anonim. Pelaku yang lebih dewasa ini lebih sadar akan resiko hukum terkait dengan tindak perundungan tersebut serta mencoba untuk menghindari konsekuensi hukum agar sulit di lacak oleh pihak yang berwenang.

Banyak kasus perundungan di media sosial melalui media sosial diawali dengan respons impulsif dan emosional terhadap komentar yang melecehkan seseorang, atau dimulai dari pernyataan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Komentar yang sifatnya memprovokasi atau menyinggung perasaan seseorang dapat menimbulkan reaksi yang lebih emosional, terutama jika reaksi tersebut datang dari orang yang merasa tidak terima atau tidak suka dengan komentar tersebut. Hal ini dapat memicu pelaku untuk melakukan tindakan perundungan, di mana mereka akan terus-menerus mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang tersebut.

b. Kepribadian Pelaku dan Korban

Baik pelaku maupun korban perundungan di media sosial memiliki karakteristik tertentu yang saling terkait, sehingga memperkuat terjadinya tindakan perundungan tersebut. Dalam hal ini, karakteristik kepribadian pelaku perundungan di media sosial antara lain adalah memiliki kepribadian yang dominan, kuat, dan menunjukkan sedikit rasa empati pada orang lain. Selain itu, pelaku cenderung memiliki sikap positif terhadap kekerasan dibandingkan dengan orang lain, serta tidak berani menghadapi resiko akibat perbuatannya sendiri. Pelaku perundungan di media sosial juga memiliki kebutuhan sensasi akan hal-hal baru dan pengalaman baru yang dapat memicu perilaku perundungan. Disisi lain karakteristik

¹⁷ Rosihan Juhriah Rangkuti, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

kepribadian korban perundungan di media sosial antara lain adalah rapuh, lemah, belum dewasa, serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang belum cukup untuk membuat keputusan secara efektif. Korban perundungan cenderung lebih rentan terhadap serangan verbal atau psikologis yang dapat menyebabkan trauma dan kerusakan psikologis pada diri korban khususnya pada usia remaja.

Usia remaja lebih dominan pada faktor ini. Usia muda cenderung labil, mencari jati diri dan ingin mengeksplorasi banyak hal. Pada tahap ini, usia muda cenderung melihat dan mempelajari hal-hal yang berbeda dari lingkungannya. Pembelajaran usia muda selalu diidentikkan dengan berbagai interaksi antar kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, seperti keluarga, saudara kandung dan teman sebaya. Sementara itu, kehadiran media sosial menciptakan interaksi yang akrab tanpa perlu saling mengenal. Masalahnya adalah banyak orang yang melakukan perilaku negatif di media sosial yang akhirnya ditiru oleh para usia remaja, mereka sering terlihat berulang kali melakukan perundungan di media sosial dengan memposting foto editan korban mereka dengan cara yang berbau intimidasi, dan mereka mengaku belajar tentang intimidasi tersebut dari media sosial orang lain. Mereka melihat tren penggunaan meme di jejaring sosial dan mengikutinya. Perundungan melalui media sosial dikarenakan perilaku mencoba meniru perilaku orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor dalam perundungan melalui media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkembangan teknologi memudahkan orang – orang menjadi sarana komunikasi khususnya di dunia maya. Akan tetapi ketika banyak orang berinteraksi di dunia maya maka secara otomatis konflik ataupun masalah akan muncul di karenakan akibat langsung dari penggunaan tersebut. Semakin tinggi interaksi yang dilakukan maka semakin memperbesar kemungkinan terjadinya perundungan di media sosial.

Fakta bahwa perundungan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Kejahatan jenis ini biasanya terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memahami atau mengenal ketidaktahuan akan resiko hukum yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa perundungan yang dilakukan mereka hanyalah sekedar ungkapan diri atau bercanda belaka. Ketidaktahuan akan resiko hukum tersebut dapat terlihat lebih jelas khususnya anak di bawah umur yang masih awam akan konsekuensi sebab-akibat sehingga seseorang tidak menyadari dampak tindakan mereka dan memicu tindak pidana perundungan melalui media sosial.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan melalui Media Sosial

Perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak asasi saksi dan/atau korban ditegakkan serta memberikan bantuan yang dibutuhkan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi mereka.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menjadi semakin penting karena dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi setiap warga negara.¹⁸

Phillipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki dua aspek, yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pelanggaran hukum, sedangkan represif dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya preventif, seperti memberikan pendidikan hukum dan sosialisasi, memperketat pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum, serta memberikan insentif atau sanksi. Sedangkan upaya represif melibatkan tindakan penegakan hukum, termasuk menindak pelanggar hukum, memberikan sanksi atau hukuman, serta menjamin proses pengadilan berlangsung secara adil dan transparan. Keseimbangan antara upaya preventif dan represif sangat penting dalam penegakan hukum publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹⁹

Perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok dalam rangka menjamin kepastian hukum dan

¹⁸ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H. 50.

¹⁹ Philipus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. H. 29.

keadilan dalam masyarakat.

Menurut Dimas Handoko dan Yeni Widowaty menegaskan bahwa, perlindungan hukum untuk korban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan *abstracto* atau tidak langsung, dan perlindungan *concreto* atau langsung. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum positif, tindakan pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma atau ketertiban hukum secara abstrak, bukan sebagai serangan atau pelanggaran terhadap kepentingan pribadi dan konkret seseorang sebagai korban.²⁰

Secara umum terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum *In Abstracto*

Bentuk perlindungan *In Abstracto* atau tidak langsung berupa penerapan norma-norma serta peraturan yang ditegakkan demi terciptanya perlindungan anak selaku korban tindak kejahatan. Seperti Peraturan Perundang - Undangan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah.

b. Perlindungan Hukum *In Concreto*

Bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada korban seperti pemberian yang bersifat materiil (kompensasi) seperti biaya pengobatan serta yang bersifat non-materiil seperti perlindungan hukum pidana, perdata atau administratif yang diberikan melalui proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum sehingga menciptakan rasa aman terhadap korban perundungan media sosial.

Korban tindak pidana perundungan di media sosial berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 "Setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum." Diamana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak diperlakukan secara adil dan memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Perlindungan hukum bagi korban perundungan di media sosial dapat dilihat dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE mengatur berbagai hukum siber yang dilakukan secara modern, termasuk penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satu hal yang diatur dalam UU ITE adalah pelecehan media sosial, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Dalam pasal ini dijelaskan tentang tindakan pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, dan diatur sanksi hukumnya bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 27 ayat (3) merujuk pada tindakan penyebaran atau distribusi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak sah dan disengaja oleh individu tertentu. Tindakan ini meliputi tindakan membagikan atau mengirimkan informasi tersebut kepada pihak lain atau membuatnya dapat diakses oleh orang lain melalui media elektronik. Jenis informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah yang mengandung konten atau muatan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik orang lain.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE menegaskan bahwa Tindakan menyebarkan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung pemerasan atau pengancaman tanpa hak dan dengan sengaja merupakan tindakan pidana yang dapat ditindak sesuai dengan undang-undang. Sebuah tindakan yang memiliki sifat merugikan orang lain dengan menyebarkan informasi dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap pasal tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerasan dan pengancaman memiliki unsur yang sama, yaitu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP seperti yang telah dijelaskan dalam BAB III.

Selain KUHP dan UU ITE korban tindak pidana perundungan di media sosial juga berhak mendapat perlindungan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

²⁰ Dimas Handoko & Yeni Widowaty. (2022). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*. 4(1). H. 14-33.

²¹ Prigel Manggolokusumo & Yeni Widowaty. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1(2). H. 32.

Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban “Melindungi keamanan individu, keluarga dan harta benda. Korban juga merupakan korban yang paling banyak, sehingga korban juga berhak untuk berpartisipasi dalam identifikasi dan pemilihan segala bentuk perlindungan dan dukungan”.

Perlindungan hukum bagi korban perundungan di media sosial dilakukan dengan memenuhi hak – hak korban yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan dimana korban berhak mendapatkan kerahasiaan identitas selama proses pemeriksaan dilaksanakan bahkan korban juga berhak mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru dan bantuan biaya hidup yang berkaitan dengan reportasi korban seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Pada tahap penyidikan dan penuntutan korban berhak memilih untuk diam atau memberikan keterangan tanpa tekanan serta pada tahap penuntutan dan persidangan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan terkait kasus perkara.

Persidangan yang dilakukan dalam perkara tindak pidana perundungan melalui media sosial dilakukan apabila perlimpahan berkas dari Penuntut Umum telah diserahkan, maka selanjutnya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan atas berkas tersebut. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan negeri wajib menetapkan ataupun majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang ditunjukkan kepadanya serta tidak boleh menolak dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukumnya.

Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur dimana “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian, kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang memunculkan akibat akibat dari penderitaan yang memiliki keterkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan psikologi ataupun perawatan medis.”

Selain perlindungan hukum yang diberikan di atas adapun upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh departemen Kementrian Hukum dan Ham berupa perlindungan secara “Preventif”. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan untuk memberikan pencegahan dari sebuah pelanggaran.

Menurut Rina Nurul selaku Devisi Bantuan Hukum Kementrian Hukum dan Ham perlindungan Preventif tindak pidana perundungan di media sosial dilakukan dengan cara sosialisasi ataupun penyuluhan hukum di berbagai instansi ataupun kelembagaan sosial seperti sekolah ataupun kepolisian. Tugas Devisi Bantuan hukum sendiri yaitu memberikan informasi, panduan, serta pemahaman dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, serta menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka pentingnya perlindungan hukum bagi korban perundungan melalui media sosial juga harus diakui dan diperhatikan secara serius. Korban perundungan melalui media sosial rentan mengalami gangguan psikologis dan stigma sosial yang parah, dan bisa saja dibutuhkan dokter psikologis untuk menyembukannya dari rasa trauma, sehingga perlindungan hukum harus diberikan untuk melindungi kesejahteraan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan tegas perlu dilakukan untuk menindak pelaku perundungan secara adil dan memastikan bahwa korban mendapat keadilan yang pantas. Selain itu, pihak-pihak terkait, termasuk penyedia layanan media sosial, juga harus memainkan peran aktif dalam memberikan perlindungan dan mencegah tindakan perundungan di platform mereka. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang serius dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu mengurangi kasus perundungan dan melindungi hak asasi manusia di era digital.

IV. Keimpulan

Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang datang dari luar hal ini mencakup penggunaan media sosial dan lingkungan sosial itu sendiri seperti perkembangan teknologi yang pesat menjadi suatu trobosan untuk sarana bagi banyak orang dalam berkomunikasi, namun ketika banyak orang berinteraksi di dunia maya maka konflik dan masalah pun akan muncul sebagai akibat langsung dari perkembangan teknologi tersebut. Lemahnya Control Sosial seperti peran norma agama dan norma sosial juga menjadi alasan mengapa perundungan selalu meningkat tiap tahunnya,

sebab perundungan di media sosial seperti sudah menjadi hal biasa, dan seolah-olah diterima oleh masyarakat.

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maupun korban seperti kepribadian pelaku yang masih memiliki emosi yang tidak stabil, kekecewaan yang mendalam, marah, sakit hati, perasaan untuk membalas dendam, sedangkan kepribadian korban lebih menunjuka sifat rapuh, lemah, belum dewasa, serta memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang belum cukup untuk membuat suatu keputusan. Hal ini juga berkaitan dengan beberapa orang yang tidak mengetahui konsekuensi akan hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melakukan perundungan melalui media sosial tanpa memahami risiko hukum yang terkait dengan tindakan tersebut.

Bentuk Perlindungan hukum korban perundungan di media sosial dapat berupa perlindungan *in abstracto* dan *in concreto* yang telah diatur dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana korban berhak mendapatkan restitusi ataupun kompensasi serta berhak mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikologis. Adapun bentuk perlindungan hukum perundungan di media sosial yang dilakukan oleh Departemen Kementrian Hukum dan Ham yang bersifat preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan serta pemahaman agar dapat menjamin penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.

Daftar Pustaka.

- Adawiyah, S. R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja* (Thesis). Yogyakarta. Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan.
- Data Reportal. (2022). Data Perundungan di Media Sosial. Diakses pada Selasa, 22 Nopember 2022, Pukul 21.00 WIB. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.
- Diena Haryana. 2020. Bincang Sejiwa. Diakses Pada Senin, 2 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB. <https://sejiwa.org/notulensi-sesi-perdana-bincang-sejiwa/>.
- Dimas Handoko & Yeni Widowaty. (2022). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*. 4(1).
- Fatma Utami & Nur Baiti. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Cakrawala*. 18(2).
- Febrizal Antama. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta Indonesian. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 2(2).
- Lianthy Nathania Paat. (2020). Kajian Hukum terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*. 1(9).
- Maskun. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mohamad, F.Z. (2022). KPAI: Cegah cyberbullying Ajari anak Menjaga Privasi di Sosial Media. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 18.00 WIB. <https://mediaindonesia.com/humaniora/437242/kpai-cegah-cyberbullying-ajari-anak-menjaga-privasi-di-sosial-media>.
- Nababa, Josua. (2022). Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dengan Cara Pengancaman Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum UHN*. 2(1)
- Novita Maulidya & Miftah Idris Muliana. (2020). Faktor-faktor *Cyberbullying* pada Remaja. *Jurnal IKRA-ITH*. 5(2).
- Nurahma Yanti. (2018). Fenomena *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pustaka Ilmiah*. 4(1).
- Philipus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ponny Retno Astuti. (2008). *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Prigel Manggolokusumo & Yeni Widowaty. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1(2).

- Rigby Ken, Elinda Emza. (2015). *Fenomena Bulliyng di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta* (Skripsi). Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sartana, Afriyeni, N. (2017). Perilaku perundungan maya (*cyberbullying*) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight Universitas Pendidikan Indonesia*. 1(1).
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Yunus Winoto & Andi Rahmat Sopian. (2019). Remaja dan Pandangannya terhadap *Cyberbullying* pada Media facebook. *Jurnal Komunikasi dan Media*. 3(2).